# **BAB I**

# **PENDAHULUAN**

## **1.1** **Latar Belakang**

Perparkiran menjadi fenomena yang sering dijumpai dalam sistem transportasi fenomena parkir tersebut terjadi hampir di seluruh daerah yang ada di Indonesia. Parkir dapat berupa parkir kendaraan bermotor dan kendaraan bermobil. Keduanya dapat mengganggu kenyamanan pengguna jalan dan menghambat aksestabilitas antar wilayah.

Pusat perdagangan dengan aktivitas yang tinggi biasanya terletak di pusat kota seperti dijalan Riau atau sekarang lebih di kenal sebagai jalan L.L R.E Martadinata. Munculnya aktivitas yang tinggi di pusat kota akan terjadi kemacetan. Kemacetan yang ada dikarenakan bertambahnya perjalanan, dari bertambahnya perjalanan akan bertambah pula parkir dikawasan sarana pendidikan, rumah sakit, pengadilan, restoran, pusat perdagangan dan tempat hiburan. Hal tersebut akan munculnya pertambahan lokasi-lokasi parkir baru di badan jalan, karena kurangnya lahan parkir yang disediakan.

Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk diimbangi dengan peningkatan kesejahteraan hidup membuat masyarakat menjadi lebih konsumtif salah satunya dalam pemilikan kendaraan pribadi seolah kendaraan itu menjadi kebutuhan yang mendesak, diimbangi dengan kemampuan daya beli yang tinggi dan dapat dibayar dengan sistem kredit yang dimana dengan sistem seperti ini calon pembeli dapat langsung memiliki kendaraan tersebut hanya dengan membayarkan uang muka nya saja. Dengan demikian maka bertambahnya jumlah kendaraan berimplikasi pada jumlah lahan parkir yang digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Pada beberapa kasus, pihak lain sering menyalahgunakan lahan parkir untuk mendapatkan keuntungan lahan parkir menjadi masalah yang penting dan mendesak yang membutuhkan perhatian lebih dari pemerintah daerah.

Penyediaan sarana parkir merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pasal 43 yang menyebutkan bahwa “(1) Penyediaan fasilitas parkir untuk umum hanya dapat diselenggarakan di luar ruang milik jalan sesuai dengan izin yang diberikan”. Penyediaan fasilitas parkir tersebut dapat dilakukan oleh perseorangan warga negara Indonesia atau badan hukum Indonesia, baik berupa usaha khusus perparkiran maupun penunjang usaha pokok.

Pemerintah Daerah yang pengelolaan parirnya ditangulangi secara khusus pada unit kerja dinas adalah Pemerintah Daerah Kota Bandung. Pengelolaan parkir secara operasional di Kota Bandung dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan sehingga sangat berpengaruh terhadap kinerja aparatur Dinas Perhubungan dalam pengelolaan parkir secara menyeluruh.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 16 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Perhubungan Dan Retribusi di Bidang Perhubungan. Di Kota Bandung ada tiga pembagian zona yang dibedakan berdasarkan wilayah dan tarif parkir yaitu kawasan pinggiran kota, penyangga kota, dan pusat kota.

Dari pengamatan awal yang dilakukan peneliti di Dinas Perhubungan Kota Bandung, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian yang lebih lanjut yang dituangkan dalam judul **“EVALUASI KINERJA DINAS PERHUBUNGAN KOTA BANDUNG (STUDI KASUS PENERTIBAN PARKIR DI JALAN RIAU)”**

## **1.2 Fokus Penelitian dan Perumusan Masalah**

### 1.2.1 Fokus Penelitian

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka peneliti memfokuskan hal yang dibahas mengenai evaluasi kinerja yaitu dilihat dari pengembangan sumber daya manusia, pemberian penghargaan dan reward, menyusun program peningkatan produktivitas, promosi, mutasi, rotasi, dan evaluasi. Terdapat dalam aspek-aspek evaluasi kinerja pada bukunya Payaman J Simanjuntak, Manajemen dan Evaluasi Kinerja (2005:105).

### 1.2.2 Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari latar belakang penelitian, maka dapat dirumuskan masalah dalam bentuk pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Sejauh mana evaluasi kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di Jalan Riau ?
2. Apa saja hambatan yang terdapat dalam evaluasi kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di Jalan Riau ?
3. Upaya apa saja yang di dilakukan untuk meningkatkan evaluasi kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di Jalan Riau ?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan diadakannya penelitian adalah:

1. Mengetahui evaluasi kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di Jalan Riau.
2. Mengetahui hambatan evaluasi kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di Jalan Riau.
3. Mengetahui upaya dalam meningkatkan evaluasi kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di Jalan Riau.

## **1.4 Kegunaan Penelitian**

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberi bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya Ilmu Administrasi Negara tentang evaluasi kinerja.

1. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan dan pengetahuan tentang evaluasi kinerja Aparatur Dinas Perhubungan Kota Bandung dalam penertiban parkir di Jalan Riau.